

**JURNAL PROSIDING**  
**ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

---

**Evaluasi Pelayanan Publik Dalam Perspektif Pengembangan Wilayah di Kota Medan**

**Kariamansinaga**

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Dharmawangsa

Email: kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id

---

**Abstrak**

Pelayanan publik merupakan tahapan kedua setelah tahapan pembangunan sedangkan pemberdayaan merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah. Pembahasan tentang pelayanan publik dalam perspektif pengembangan wilayah menjadi penting sejalan dengan awal pemerintahan Kota Medan Periode 2020 – 2024 hasil pemilukada 2014. Mengawali pemerintahan dengan hasil pemilukada yang tidak mencapai 50 % dari partisipasi politik masyarakat menjadi starting point yang sangat menentukan kembalinya Kota Medan sebagai kota yang mampu berkembang dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan menggunakan indikator pengembangan wilayah yang meliputi: kebijakan publik, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan sumberdaya manusia. Pengembangan Kota Medan tidak terlepas dari pembangunan nasional yang terkait infrastruktur namun tetap mengedepankan pentingnya konsep good governance untuk menjalankan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dasar analisis yang dibangun adalah tahapan pembangunan yang meliputi pembangunan fisik yang diikuti dengan tahapan pelayanan publik. Sedangkan tahapan pemberdayaan masyarakat lebih kepada buah dari pembangunan dan pelayanan publik karena telah memberikan kepercayaan dan kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep awal tuntutan pelayanan publik yang menuntut adanya penguatan kepentingan publik sesuai dengan tuntutan nilai-nilai demokrasi. Dalam konsep pembangunan nasional dinyatakan sebagai pembangunan yang memprioritaskan peningkatan sumberdaya manusia. Pelayanan publik dalam konteks pengembangan wilayah dalam berbagai sektor yang menjadi pembahasan berdasarkan upaya peningkatan kualitas masyarakat secara kuantitas dan secara kualitas.

**Kata Kunci: Pembangunan, Pelayanan Publik, dan Pengembangan Wilayah**

**Abstract**

Public service is the second stage after the development stage, while empowerment is a measure of the success of development and public services carried out in the context of regional development. The discussion about public services in the perspective of regional development becomes important in line with the beginning of the Medan City government for the 2020-2024 period of the 2014 post-conflict local election results. Starting the government with the results of the post-conflict local election that did not reach 50% of the community's political participation became the starting point that would determine the return of Medan City as a city that able to develop based on community empowerment. The evaluation is carried out using regional development indicators which include: public policy, infrastructure, economic growth and human resources. Medan City development is inseparable from national development related to infrastructure but still prioritizes the importance of the concept of good governance to carry out development, public services, and community empowerment. The basis of the analysis that is built is the stages of development which include physical development followed by stages of public services. to the fruits of development and public services because they have given public trust and awareness. This is in line with the initial concept of demands for public services which demand the strengthening of public interests in accordance with the demands of democratic

---

---

values. In the concept of national development, it is stated as development that prioritizes increasing human resources. Public services in the context of regional development in various sectors are being discussed based on efforts to improve the quality of society in quantity and quality.

**Keywords: Development, Public Service, and Regional Development**

---

## **A.Pendahuluan**

Keberhasilan pengembangan suatu daerah atau wilayah sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam menjalankan pelayanan publik. Berdasarkan tahapannya, pelayanan publik diperoleh setelah dijalankannya program pembangunan. Sedangkan hasil selanjutnya setelah keberhasilan pelayanan publik adalah diperolehnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi hasil akhir yang diharapkan akan menunjukkan adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang diperoleh setelah keberhasilan dalam pelayanan publik.

Berdasarkan wilayah administratif pemerintahan, pelayanan publik yang dilakukan dapat dilihat pada level nasional, level pemerintah daerah, hingga ke pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan RT/RW atau lingkungan. Dalam konteks pelayanan publik, struktur pemerintahan tersebut sangat menentukan karena terkait

dengan implementasi dari pelaksanaan program pembangunan yang memerlukan adanya komunikasi, koordinasi, maupun disposisi sehingga program kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pemerintah Kota Medan yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia, saat ini memiliki permulaan yang kurang baik dari aspek politik yang ditandai dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat yang dilaksanakan melalui pemilukada Tahun 2019. Berdasarkan hasil pemilukada tahun 2019 tingkat partisipasi pemilih kurang dari 50 % yang menjadi salah satu indikasi lemahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian menjadi tantangan besar dari pemerintah karena rendahnya kepercayaan masyarakat. Sehingga untuk memperbaikinya diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik sejalan dengan program pembangunan yang dijalankan.

Pada pembahasan ini, penulis akan membahas keterkaitan program pembangunan yang dijalankan dengan pelayanan publik yang akan

menghasilkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Dalam konteks pengembangan wilayah memiliki cakupan yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan publik. Perspektif pengembangan kota yang dimaksud dilihat secara umum dan secara khusus melihat Kota Medan serta melakukan perbandingan dengan kota-kota lainnya.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pelayanan Publik**

Sesuai dengan perkembangan sejarah peradaban dunia, dapat diketahui bahwa pembelaan terhadap kepentingan publik merupakan hal yang sangat diprioritaskan. Perubahan paradigma ini sejalan dengan tuntutan demokrasi yang terjadi secara global untuk penguatan kedaulatan rakyat. Sejarah penguatan demokrasi itu sendiri dapat diketahui melalui adanya revolusi sosial di Perancis yang terkenal dengan lahirnya teori pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang disebut teori Trias Politica oleh Montesquieu. Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi melalui ketetapan pada Undang-Undang dasar 1945.

Pelayanan publik menjadi tuntutan perkembangan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan memerlukan penyesuaian-penyesuaian oleh lembaga-lembaga terkait untuk pencapaian tujuannya. Penguatan nilai-nilai demokrasi yang dimaksud sesuai konsep good governance yang menegaskan perlunya sinergitas dengan pihak swasta dan masyarakat. Penyesuaian lainnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah terhadap tuntutan Revolusi Industri 4.0 yang merupakan keniscayaan dan meliputi semua aspek kehidupan.

Indonesia sebagai negara yang menjalankan demokrasi dan menerapkan otonomi daerah, sangat menuntut adanya pengelolaan pelayanan publik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Dalam pelaksanaannya pelaksanaan otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah di tingkat provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.

### **2. Jenis Kebijakan**

Ada tiga jenis kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah meliputi:

#### **a. Kebijakan Pembangunan**

APBN maupun APBD merupakan anggaran pembiayaan pembangunan yang dalam penggunaannya harus melakukan

pertanggungjawaban sesuai dengan pasal 30 UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dalam hal pelaksanaan APBD pemerintah pusat memiliki wewenang yang kuat dalam mengendalikan penggunaan pembiayaan pembangunan. Secara singkat dalam penggunaannya maka diharapkan berjalannya pembangunan yang sesuai dengan tuntutan publik.

Pengertian pembangunan diartikan sebagai proses perubahan suatu keadaan yang dianggap lebih baik atau adanya suatu proses menuju ke arah yang lebih baik (Lehman, 1979). Sedangkan paradigma pembangunan itu sendiri meliputi: pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi atau sering juga disebut berdasarkan pendapatan percapita (econic growth). Pembangunan yang melihat berdasarkan perbaikan kualitas hidup, dan paradigma pembangunan yang melihat pemanusiaan manusia agar mampu menciptakan sejarahnya bukan hanya menerima sejarah yang diciptakan orang lain.

Secara spesifik pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dapat dilihat berdasarkan peran yang dilakukan yaitu: pembuatan peraturan, penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan

bimbingan, perizinan, pengawasan, bisnis, dan sosial. Sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik sebagaimana konsep good governance dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah (negara) dengan pihak swasta (private). Masyarakat menjadi pengguna pembangunan yang dilaksanakan dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kualitas pembangunan yang dijalankan.

#### b.Kebijakan Pelayanan

Peningkatan pelayanan merupakan upaya yang dilakukan setelah menjalankan program pembangunan. Upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik dilakukan sebagaimana konsep good governance yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pembangunan. Hal ini seperti yang dilakukan pada pelayanan yang mengalami peningkatan pada pelaporan keuangan pemerintah atas APBN yg tadinya 9 bulan melalui UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuanagn negara telah diperpendek waktunya menjadi 6 BULAN. Demikian juga terkait kasus *dualingtime* di Pelindo maupun kasus-kasus lainnya yang menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi

dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan.

Dalam kaitan dengan pengembangan suatu kota atau wilayah maka pelayanan publik yang terkait kemudahan akses informasi yang diperoleh masyarakat sangat diperlukan agar dapat mengikuti perkembangan kemajuan suatu kota dan memberikan kejelasan terkait pembangunan yang berjalan. Hal ini juga dapat menjadi menjadi salah satu sarana tolok ukur yang akan memberikan gambaran tentang keberhasilan atau daya saing daerah atau dalam pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.

### c. Kebijakan Pemberdayaan

Kesadaran masyarakat merupakan dasar keberhasilan yang diperoleh melalui program pembangunan dan pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Untuk mendukung program pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberdayakan berbagai komunitas seperti komunitas pemuda, komunitas sosial, atau komunitas wanita sehingga memberikan integrasi atas program yang dijalankan.

Untuk kesiapan program pemberdayaan sangat dibutuhkan kesiapan infrastruktur dan pelayanan

publik yang baik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi karena telah menghasilkan kepercayaan dari pengguna atau masyarakat. Fasilitas Wi-Fi gratis misalnya harus diberikan kepada masyarakat secara maksimal karena hal ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi maupun untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan aktivitas masyarakat.

Komponen lain untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui defenisi yang ditetapkan oleh IIED dan WBCSD (2002) yang menyatakan adanya tiga kelompok kategori sebagai pemangku kepentingan. Adapun ketiga komponen tersebut meliputi: a. Perusahaan yang terdiri dari karyawan, manajemen, serta para pemegang saham. B. Masyarakat yang terdiri dari pelaku bisnis, penyelia layanan, pemilik lahan, dan pengusaha setempat. c. pemerintah pusat/ the state yang meliputi pejabat yang berwenang, regulator, lembaga pengelola tanah, serta lembaga pemerintah lainnya.

### 3. Pengembangan Wilayah

Hakikatnya pengembangan wilayah merupakan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan baik secara kualitas

maupun secara kuantitas suatu masyarakat. Hal ini terkait dengan dasar pengembangan suatu wilayah itu sendiri meliputi: infrastruktur, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan publik. Pengembangan wilayah dilakukan sejalan dengan tuntutan perkembangan wilayah baik secara local, regional, maupun global yang selalu berjalan secara dinamis dan memerlukan respon bagi perkembangan masyarakat sendiri dan tuntutan pengembangan wilayah.

Dasar-dasar pengembangan wilayah dapat dilihat berdasarkan pada 4 (empat) aspek yaitu: pertumbuhan ekonomi, kebijakan publik, infrastruktur, dan sumberdaya manusia. Melalui indikator tersebut dilakukan pengembangan baik dalam level pemerintah kota/kabupaten, provinsi, maupun pada pengembangan wilayah atau suatu kawasan. Dasar dalam pengembangan dilakukan dengan data yang dimiliki yakni data terakhir sebelum perencanaan pembangunan dimulai sehingga sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat (Sinaga, Kariaman: 2021).

### **C.Pembahasan**

#### **1.Pembangunan dan Pelayanan Publik**

Implementasi kebijakan dapat dibedakan berdasarkan sifat kebijakan yaitu kebijakan yang bersifat mikro hanya melibatkan 1 atau 2 lembaga dan kebijakan makro yang melibatkan banyak lembaga sebagaimana yang dilakukan secara nasional. Persoalan yang dihadapi juga memiliki kompleksitas yang berbeda dikarenakan variabel pembangunan pada level pemerintah daerah dan level pemerintah nasional memiliki perbedaan. Persoalan pembangunan yang dihadapi secara nasional meliputi persoalan: kemiskinan, pengangguran, dan persoalan lainnya.

Kerjasama antar stakeholder merupakan bagian yang sangat menentukan dalam proses implementasi pembangunan dan pelayanan publik. Data yang dimiliki pemerintah Kota Medan sangat perlu untuk dilakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan yang dialami. Secara mendasar bahwa kebutuhan akan data suatu kota akan menjadi landasan untuk melakukan pengembangan yang salah satunya adalah pengembangan inovasi untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sikap oppurtinis masyarakat terhadap pemerintah salah satunya

disebabkan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah tidak memberikan effect langsung terhadap pelayanan publik. Bahkan yang terjadi pembangunan yang dijalankan “prematur” sehingga tidak menghasilkan kepercayaan dan selanjutnya pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Hal ini berlaku pada berbagai lapisan masyarakat tergantung pada kebutuhan atau tingkat perekonomian masing-masing anggota suatu masyarakat. Ketidakpercayaan (distrace) yang akan menghasilkan barisan masyarakat yang oposan sehingga menghambat pengembangan suatu kota.

Untuk mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Bab 4, Pasal 8 harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.penyusunan rencana, 2.penetapan rencana, 3.pengendalian pelaksanaan rencana, dan 4.Evaluasi pelaksanaan rencana. Melalui undang-undang yang telah ditetapkan, maka bidang pelayanan publik harus menjadi acuan sehingga akan memberikan kepercayaan yang menghasilkan masyarakat yang berdaya.

Evaluasi pembangunan yang dilaksanakan di Kota Medan khususnya

dalam penyediaan pelayanan publik sebagai bagian awal pengembangan wilayah dapat dilihat pada masih kurangnya penyediaan wi-fi gratis pada masyarakat terutama pada tempat-tempat pelayanan publik yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Termasuk pembangunan ruang terbuka hijau dan sarana rung terbuka yang masih kurang memenuhi standard SNI No.04 I 03.1733.2.

## **2.Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam menjalankan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh kebijakan pembangunan sebagaimana yang disampaikan pada materi sebelumnya. Untuk mendukung pembangunan yang mendukung pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa aspek: a.usulan rencana teknik (fisik/teknologi), b.usulan pola pembiayaan (pembiayaan), c.usulan penanganan konstruksi (kelembagaan), d.usulan pengelolaan hasil pembangunan (kelembagaan).

Melalui beberapa aspek yang harys diperhatikan dan dijalankan, maka pembangunan yang dijalankan akan memberikan cerminan bahwa

pembangunan yang dijalankan akan memberikan solusi bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Aspek yang dimaksud tidak hanya berlaku bagi pembangunan atau pengembangan kota, namun termasuk dalam pengembangan desa atau suatu wilayah. Tingkatan pemahaman yang dimaksud bahwa dalam pengembangan suatu kota atau suatu wilayah akan membutuhkan kegiatan pembangunan yang akan memenuhi kebutuhan pengembangan baik kota, desa, atau suatu wilayah.

Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sejalan dengan Undang-Undang no.17 Tahun 2007 Tentang Arah Pembangunan Nasional yaitu membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Hal ini untuk mempertegas urgensi pelayanan publik dalam upaya memberdayakan masyarakat. Kaitan selanjutnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan kesehatan, dan pembangunan pemberdayaan perempuan.

Kota Medan yang telah menjalankan pembangunan Trans Medan telah menunjukkan upaya pelayanan publik yang baik dan akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksud memberikan pembiayaan yang terjangkau dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan efektivitas dalam aktivitas masyarakat. Logika

pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan dapat dilihat secara jelas pada contoh pembangunan transportasi. Termasuk pelaksanaan e-parking yang harus diperluas yang pada awal pemerintahan 2020-2024 telah menjalankannya di Jalan Ahmad Yani sehingga memberikan trust bagi masyarakat Kota Medan.

Nugroho (2004: 75) mempertegas rangkaian upaya pembangunan dalam masyarakat dengan tiga jenis tugas pokok (misi) agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang yaitu: tugas pelayanan, tugas pembangunan, dan tugas pemberdayaan. Hal ini sekaligus mempertegas kaitan pelayanan publik dengan pemberdayaan pada berbagai pembangunan dalam arti luas. Evaluasi yang juga dapat disampaikan bahwa apabila pembangunan yang dilaksanakan tidak berjalan secara baik atau profesional maka pembangunan dan pelayanan yang dijalankan tidak akan sampai pada titik pemberdayaan. Pelaksanaan pemilukada yang telah menelan biaya besar menjadi contoh bahwa kepercayaan masyarakat sangat rendah sehingga masyarakat kurang percaya yang ditunjukkan dari rendahnya persentase partisipasi publik.

### **3. Pelayanan Publik dan Pengembangan Wilayah**

Pelayanan publik dalam rangka pengembangan wilayah salah satunya adalah untuk meningkatkan daya saing suatu daerah yang saat ini tidak hanya persaingan pada level regional maupun nasional tetapi sudah berada pada level global (internasional). Tuntutan revolusi industri 4.0 juga mempertegas adanya



tuntutan secara global yang telah didahului melalui perjanjian – perjanjian kerjasama yang telah dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral.

Secara kebijakan publik, pemerintah Kota Medan telah sebagai World Class bureaucracy tahun 2025 dengan indikator adalah: world class public service, bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, kapasitas dan akuntabilitas kerja, integritas layanan publik, dan kemudahan berusaha. Hal ini merupakan indikator yang akan mengantarkan pada pengembangan wilayah dan daya saing daerah sebagaimana disampaikan sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang mendukung pengembangan wilayah atau peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat ditingkat kota sangat ditentukan pula oleh kesiapan aparatur yang menjalankannya. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan baik pada bidang pembangunan, pelayanan, dan juga pemberdayaan masyarakat yang menjadi ikutan atas bidang program sebelumnya. Walikota dalam menjalankan kebijakan baik pembangunan dan pelayanan publik terkait dengan kinerja sekretaris daerah, satuan kerja perangkat daerah yang terkait, kelurahan, hingga tingkat kepala lingkungan. Apabila kelembagaan terkait tidak dapat merespon kebijakan dengan baik maka kebijakan yang dijalankan tidak akan mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh karenanya dalam pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan adanya koordinasi, komunikasi, dan

disposisi untuk meramu kebijakan agar dapat dijalankan sesuai dengan situasi dan kondisi suatu kota. Evaluasi dalam pengembangan pelayanan publik dalam pengembangan wilayah Kota Medan menunjukkan dampak positif dalam mengurangi kemacetan Kota Medan sejak 2020 yang merupakan dampak pembangunan jalan tol secara nasional khususnya di Sumatera Utara.

#### **D.Simpulan dan Saran**

Melalui pengelolaan pelayanan publik yang baik akan memberikan pengurangan pada pembiayaan pembangunan karena adanya dukungan partisipasi masyarakat. Pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena tanpa adanya keberhasilan dari pembangunan maupun dengan pelaynan tidak akan menghasilkan pemberdayaan masyarakat.

Pemahaman tentang perspektif pengembangan wilayah dapat dilihat berdasarkan pada tahapan pembangunan yang meliputi: pembangunan infrastruktur perumahan, jalan, gedung Sekolah, serta pembangunan fisik lainnya. Bidang pelayanan publik antara lain: pendidikan, kesehatan, kependudukan, keamanan, dan informasi. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang menjadi bagian akhir atau tolok ukur keberhasilan dari pembangunan yang dilaksanakan.

Sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Kota Medan adalah: meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, pengelolaan

persampahan dan retribusi parkir, pengelolaan sumber pendapatan daerah yang lebih profesional, dan peningkatan pelayanan informasi terkait pelayanan publik dan UMKM. Demikian hasil kajian yang dapat disampaikan terkait dengan pengembangan kota secara umum dan khususnya Kota Medan dalam rangka peningkatan secara kualitas dan kuantitas yang bermuara pada pembangunan manusia. Dalam konteks Kota Medan evaluasi dan prestasi yang disampaikan belum mewakili semua sektor namun lebih kepada sektor transportasi, pengelolaan perparkiran, keterkaitan pelayanan publik dengan partisipasi politik, dan terkait penyediaan ruang terbuka hijau dan sarana ruang terbuka untuk meningkatkan aktivitas masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- IIED, International Institute for Environment and Development and (WBCSD) World Business Council For Sustainable Development.2002a.Research on mine closure policy. England.
- Lehman, David (Ed), 1979, Development Theory (For Critical Studies)
- Nugroho, Riant, Kebijakan Publik: Formulasi,Implementasi, dan Evaluasi Penerbit PT Elex Media Komputindo,Jakarta,2004
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan  
Sinaga, Kariaman, Materi Musyawarah Rencana Pembangunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Tahun 2022,

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kepada Universitas Dharmawangsa.